

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul "*Kebijakan modernisasi militer RRC dalam menghadapi Krisis Selat Taiwan pasca tahun 2000*" untuk dibahas didalam skripsi ini adalah:

1. Tema keamanan (*security issues*) adalah tema klasik yang memiliki posisi penting dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Kawasan Asia Timur merupakan wilayah yang menyajikan peta politik unik, menghadirkan kecurigaan dan kewaspadaan antar negara dengan potensi konflik tinggi. Karakteristik tersebut menjadikan kawasan ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam.
3. RRC merupakan aktor penting dalam politik kawasan Asia Timur, perkembangan pesat yang dialaminya berpotensi menambah warna bagi perkembangan politik internasional.
4. Krisis Selat Taiwan adalah salah satu masalah keamanan internasional yang menjadikan Selat Taiwan sebagai yang titik paling berbahaya di Asia.
5. Militer RRC, *PLA [Peoples Liberation Army]* adalah bintang baru dalam isu keamanan di Asia Timur, pesatnya modernisasi yang dilakukan berpotensi menandingi supremasi Amerika Serikat.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui apakah tema keamanan (*security issues*) masih menjadi tema sentral dalam studi hubungan internasional.
2. Menambah khasanah pengetahuan tentang peta politik serta keamanan kawasan Asia Timur, khususnya di Selat Taiwan.
3. Menggambarkan kekuatan militer RRC dan pengaruhnya terhadap perimbangan kekuatan di seputar selat Taiwan, serta kawasan Asia Timur.

C. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin yang sekaligus mengakhiri ketegangan dunia akibat persaingan ideologi, ternyata tidak bisa membebaskan dunia dari berbagai macam konflik. Harapan dunia untuk memperoleh tatanan kehidupan internasional yang baik belum dapat terwujud sampai saat ini. Masalah internasional yang belum terselesaikan adalah masih adanya konflik antar negara pada tingkat regional. Isu keamanan regional berkembang menjadi salah satu tema sentral pada perkembangan politik internasional dewasa ini.

Salah satu wilayah dunia yang sangat rentan terhadap konflik keamanan adalah kawasan Asia timur. Wilayah ini menyajikan peta politik yang dipenuhi kecurigaan, kewaspadaan antar negara dengan masing-masing negara berkepentingan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah ditengah kawasan dengan potensi konflik tinggi, hal tersebut ditunjang maraknya klaim tumpang tindih antar negara atas wilayah tertentu.

Krisis Selat Taiwan adalah salah satu krisis yang masih bertahan di kawasan Asia Timur. Krisis ini melibatkan Cina Komunis [RRC], dan Cina Nasionalis [Taiwan]. RRC saat ini dianggap sebagai kekuatan baru yang berpotensi merubah peta politik regional Asia Timur. Sedangkan Taiwan, meskipun wilayahnya kecil, namun negara ini mempunyai kekuatan politik dan ekonomi yang cukup signifikan ditingkat regional.

Krisis Selat Taiwan adalah krisis lama yang sudah berlangsung sejak 1949, yaitu ketika pemerintah sah Republik Cina yang berhaluan nasionalis terdesak oleh pemberontakan Partai Komunis Cina dan terpaksa mundur ke Taiwan. Sejak saat itu Cina Daratan dikuasai komunis, sedangkan Cina Nasionalis berkuasa di Taiwan. Saling klaim tentang siapa yang sah menggunakan nama Cina, dimulai sejak saat itu. Pasang surut krisis sudah berlangsung lebih dari lima dekade, dan sampai saat ini belum didapat jalan penyelesaian yang disetujui kedua belah pihak. Para analis keamanan melihat Krisis Selat Taiwan sebagai titik paling berbahaya di wilayah Asia.¹

Isu sentral dalam konflik selat Taiwan adalah masalah "*One China principle*". Prinsip tersebut mulai mengemuka tahun 1992 sebagai dasar reunifikasi damai antara RRC dan Taiwan. Baik RRC maupun Taiwan pada waktu itu sepakat menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar proses unifikasi, namun memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan definisi Satu China. Inti dari perdebatan itu adalah berhubungan dengan kedaulatan Taiwan.

¹ Dibb, Paul, "*Strategic Trends*", Naval War College Review, winter 2001, vol. 54 Issue 1 .hal.22

RRC memiliki agenda besar untuk menyatukan Taiwan kedalam satu Cina dibawah pemerintahan Beijing. RRC menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri. Para penguasa komunis bersikukuh akan menyatukan kembali pulau itu dengan Cina daratan, dengan cara apapun. Dengan prinsip "Satu China" yang tidak bisa ditawar, Beijing menganggap hanya ada satu negara Cina di dunia internasional, yaitu Cina Daratan (dengan nama resmi, *Republik Rakyat China* atau RRC).²

Sedangkan pihak Taiwan beranggapan bahwa mereka memiliki kedaulatan penuh sebagai suatu negara dan berhak mengeluarkan kebijakan militer, kebijakan ekonomi, mempunyai kepentingan politik di Asia Timur, maupun berhubungan diplomatik dengan negara lain.³

Pembicaraan damai yang mulai dirintis sejak 1992, beberapa kali menemui ganjalan, diantaranya pada 1995 ketika Presiden Lee Teng Hui mengumumkan prinsip baru "two states", disusul dengan redefinisi hubungan Taiwan-RRC sebagai "special state-to-state relation" pada 1999. Perkembangan politik dalam negeri Taiwan yang mengarahkan agar Taiwan dapat diakui secara internasional sebagai negara merdeka, juga dianggap RRC sebagai tantangan terhadap prinsip Satu China.⁴

² <http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/01/opi2.htm>

³ *China's Policy Towards Taiwan: From War to Investment?*

Lebih jauh lihat : http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/2003/Vol29_2/9.htm

⁴ http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/2003/Vol29_2/9.htm

Ketegangan hubungan lintas Selat Taiwan meningkat ketika *Partai Demokrat Progresif* berkuasa lewat pemilu demokratis tahun 2000, sekaligus mengakhiri dominasi Partai Nasionalis yang telah berkuasa selama 55 tahun. Presiden Chen Sui Bian memilih jalan yang lebih progresif dalam memperjuangkan kemerdekaan Taiwan secara *de jure*. Sejak awal pemerintahannya Chen menolak *One China Principle* sehingga membuat pembicaraan damai semakin tidak jelas. Bahkan ketika PDP, yang tetap mengusung platform "*merdeka bagi Taiwan*", kembali menang pada pemilu 2004, pemerintahan Chen Sui-bian melangkah lebih jauh, dengan mencoba menyusun ulang konstitusi yang pro-kemerdekaan. RRC menganggap berbagai manuver politik yang dilakukan Presiden Chen sebagai usaha nyata untuk meraih kemerdekaan, dan mengancam akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghentikan manuver tersebut.

Kekhawatiran RRC bertambah dengan semakin meningkatnya kemampuan militer Taiwan, oleh paket penjualan senjata dari Amerika Serikat. Pada Maret 2001, pemerintahan Presiden Bush meluluskan paket transfer senjata terbesar sejak penjualan 150 unit F-16 pada 1992. Dalam paket tersebut, disetujui 4 unit destroyer kelas Kidd, 8 unit kapal selam diesel, dan 12 unit pesawat P-3C Orion pemburu kapal selam akan ditransfer ke Taiwan dalam waktu 10 tahun. Dengan kemampuan militer yang semakin berkembang, akan semakin sulit untuk mengendalikan manuver Taiwan. Disisi lain paket transfer senjata ini, menunjukkan adanya kekuatan luar dalam hal ini Amerika Serikat, yang terlibat dalam Krisis Selat Taiwan.

Tabel 1

Paket transfer senjata Amerika Serikat ke Taiwan periode 2000 - 2005

Date of notification	Major item or service as proposed (usually part of a package)	Value of package (\$ million)
2000		
03/02	(162) HAWK Intercept guided air defense missiles	\$106
09/28	(146) M109A5 howitzers, 152 SINCGARS radiosystems	\$405
09/28	(71) RGM-84L Harpoon anti-ship missiles	\$240
09/28	Improved Mobile Subscriber Equipment (IMSE) communication system	\$513
2001		
07/18	(50) Joint Tactical Information Distribution Systems (JTIDS) terminals (a version of Link 16) for data links between aircraft, ships, and ground stations	\$725
10/26	(40) Javelin anti-tank missile systems	\$51
10/30	Logistical support for spare parts for F-5E/F, C-130H, F-16A/B, and IDF aircraft	\$288
2002		
06/04	(3) AN/MPN-14 air traffic control radars	\$108
09/04	(54) AAV7A1 assault amphibious vehicles	\$250
09/04	Maintenance of material and spare parts for aircraft, radar systems, AMRAAMS, and other systems	\$174
11/21	(4) Kidd-class destroyers	\$875
2003		
09/24	Multi-functional Information Distribution Systems (Po Sheng C4ISR data link upgrades)	\$775
2004		
03/30	(2) Ultra High Frequency Long Range Early Warning Radars	\$1,776
2005		
10/25	(10) AIM-9M Sidewinder and (5) AIM-7M Sparrow air-to-air missiles; continuation of pilot training and logistics support for F-16 fighters at Luke AFB, AZ	\$280

Sumber: <http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf>

Krisis selat Taiwan dalam perkembangannya menyeret RRC dalam dilema. Sheng Lijun memaparkan sedikitnya ada 3 dilema yang dialami RRC berhubungan dengan Krisis Selat Taiwan.⁵ *Pertama*, adalah dilema untuk menciptakan keseimbangan antara merespon manuver provokatif Taiwan dalam usahanya meraih kemerdekaan, dengan konsentrasi dalam melakukan pembangunan nasional. *Kedua*, bagaimana dan seberapa besar kapasitas reaksi RRC dalam menanggapi manuver Taiwan. Apabila reaksi yang dikeluarkan terlalu ringan tentu akan tidak efektif, sebaliknya apabila terlalu besar seperti uji coba senjata dan latihan militer, sangat mungkin mengundang protes dari negara lain. *Ketiga*, adalah dilema berhubungan dengan kepentingan Amerika Serikat dalam krisis Selat Taiwan.

Terlepas dari dilema diatas, RRC tetap melihat penyatuannya dengan Taiwan sebagai sebuah tujuan jangka panjang. RRC mempunyai empat pendekatan dalam mencegah Taiwan untuk menyatakan kemerdekaannya secara *de jure*, meliputi *political pressure, economic engagement, diplomatic pressure* dan *military modernization*. Disamping itu, China terus melanjutkan resolusi damai dengan menawarkan kerangka *one country, two system* kepada Taiwan. Kerangka tersebut berisi tawaran otonomi luas kepada Taiwan, dengan tetap menjadi bagian integral dari Cina Daratan.

Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan militer Taiwan, pemimpin pusat Beijing meletakkan modernisasi militer sebagai prioritas penting. Hal itu tampak

dari peningkatan anggaran militer yang signifikan, peremajaan alat perang, peningkatan intensitas dan kapasitas latihan militer di sekitar selat Taiwan, serta penempatan Krisis Selat Taiwan sebagai prioritas pertama dalam Buku Putih Pertahanan RRC.

RRC dalam hal ini menentukan karakteristik keadaan yang memungkinkan kekuatan militer China bisa digunakan sebagai alat penekan maupun elemen penghancur dalam konflik Selat Taiwan. Faktor-faktor tersebut diantaranya deklarasi kemerdekaan secara resmi oleh Taiwan, campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri Taiwan yang membahayakan posisi RRC, macetnya pembicaraan damai Selat Taiwan, dan indikasi kepemilikan senjata nuklir oleh Taiwan.⁶

Perkembangan terakhir adalah disahkannya *Anti Secession Law* oleh parlemen RRC pada 14 Maret 2005. Inti dari *Anti Secession Law* adalah melarang pemisahan diri Taiwan, atau menghadapi kekuatan militer RRC. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa RRC dibenarkan untuk melakukan cara-cara nondamai [*nonpeaceful measures*] terhadap Taiwan seandainya pulau itu mendeklarasikan kemerdekaan.⁷ UU anti pemisaan tersebut menjadi dasar legitimasi bagi China untuk melakukan aksi militer terhadap Taiwan.

⁶ Ibid, hal 7

D. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan militer RRC dalam menghadapi Krisis Selat Taiwan?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Politik internasional sebagaimana semua politik lain, merupakan "*usaha memperjuangkan kekuasaan*".⁸ Hans J Morgenthau menyatakan bahwa pokok bahasan sentral dalam studi Ilmu Hubungan Internasional adalah politik internasional atau usaha memperjuangkan kekuasaan antar negara-bangsa. Setiap pemerintahan nasional akan senantiasa dihadapkan pada perjuangan memperoleh kekuasaan ditengah-tengah komunitas internasional.

Konsep Power

Kekuasaan atau "*power*" secara *de facto* telah menjadi unsur utama dalam tindakan politik. Pandangan bahwa power adalah hal yang tidak terpisahkan dari tindakan politik, tidak berubah sejak zaman India kuno. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, timbul perdebatan panjang mengenai definisi dari konsep ini.

Kautilya, seorang ahli tata negara India kuno mengartikan "*power*" sebagai

*"pemilikan kekuatan [suatu atribut] yang terdiri dari tiga unsur, yaitu pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian."*⁹

Sedangkan dari zaman modern Hans Morgenthau mendefinisikan power sebagai *hubungan* antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.

⁸ Morgenthau, Hans J, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, (New York: Alfred A. Knopf, 1960)

⁹ Kautilya Arthashastra, dikutip dari Masoed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional; disiplin dan metodologi*, LP3ES, 1992

Dengan demikian, Power menurut Morgenthau adalah:

*"bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain [dan itu] meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan [pengendalian] itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain"*¹⁰

Columbus dan Wolfe berpendapat bahwa cara terbaik untuk memahami konsep power adalah dengan memandang power sebagai sebuah hubungan antar dua aktor yang memiliki kepentingan berbeda.¹¹ Power dipandang sebagai hubungan dinamis, yang terus menerus dan berlangsung dua arah. Tidak ada jaminan bahwa kendali aktor A terhadap aktor lain bersifat permanen. Namun dalam waktu lain sangat mungkin kendali itu bisa berkurang atau bahkan berbalik.

Power memiliki 3 unsur, yaitu:

1. daya paksa [*force*] yang didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan ekonomi maupun militer sebagai instrumen pemaksa oleh aktor dominan untuk mewujudkan tujuannya.
2. pengaruh [*influence*] didefinisikan sebagai penggunaan alat persuasif [tanpa kekerasan] untuk mengendalikan suatu aktor agar tetap sesuai dengan yang diinginkan oleh aktor pengendali.
3. wewenang [*authority*] sikap tunduk kepada aktor dominan yang diberikan oleh aktor lain. Sikap ini muncul dari wujud penghormatan, solidaritas, kasih

Berdasarkan tipenya, power dapat terbagi menjadi power militer, power ekonomi, power politik, dll. Sedangkan bila dilihat dari kepemilikannya, power dapat dibedakan menjadi power aktual yang diartikan sebagai kekuatan yang tersedia, dan power potensial merupakan kekuatan yang bisa diciptakan pada kondisi tertentu.

James Lee Ray mendefinisikan Power sebagai kemampuan relatif untuk menghancurkan barang dan membunuh orang.¹² Kata relatif menunjukkan bahwa power suatu negara tergantung pada siapa ia dibandingkan atau dihubungkan. Berdasarkan definisi ini, Ray mengatakan bahwa tidak selamanya power [kekuatan] bisa menghasilkan influence [pengaruh]. Negara A dengan power yang lebih kuat, tidak selalu dapat mempengaruhi negara B yang memiliki power lebih lemah. Negara A akan sulit mempengaruhi B apabila B mempunyai aliansi dengan kekuatan lain yang kuat dan berpengaruh. Penyebab lain adalah negara yang lemah tersebut tidak rentan [*vulnerable*] terhadap kekuatan.

Power Militer

Sesuai dengan penjelasan diatas, salah satu unsur dominan power suatu negara adalah kekuatan militer. Sistem internasional sering digambarkan sebagai sistem anarkhi, dengan demikian kekerasan dan perang menjadi ciri dominan dalam sistem internasional. Setiap negara berkepentingan mempertahankan kedaulatan dan melindungi aspek vital lainnya dengan cara apapun termasuk dengan berperang.

¹² Ibid, hal 9

Keabsahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah internasional banyak dipakai para pemimpin negara.¹³ Keputusan penggunaan kekerasan tersebut, sekaligus membuktikan bahwa peperangan adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Bahkan Piagam PBB mengizinkan bangsa-bangsa untuk menggunakan angkatan bersenjata baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mempertahankan diri, jika terjadi serangan bersenjata.¹⁴

Dalam perkembangannya, kekuatan militer tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan *survival* suatu negara dalam dunia internasional, namun lebih dari itu dapat digunakan sebagai penopang dalam proses diplomasi, yaitu sebagai alat untuk mengkomunikasikan kepentingan suatu aktor atau negara terhadap musuh potensial, mempengaruhi orientasi, tujuan dan menciptakan pengendalian atas negara lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuatan militer dapat digunakan sebagai instrumen politik luar negeri tanpa harus menggunakan kekerasan.

Teori Modernisasi Militer

Joshua Randal Rovner dalam tesisnya *The Logic of Military Modernization*, mendefinisikan modernisasi militer sebagai:

"The relevant Up-grade of existing forces or improvement via acquisition or indigenous development of new weapon system".¹⁵

¹³ Holsty, KJ, *Politik Internasional: jilid 2*, Erlangga, Jakarta. hal 31

¹⁴ Ibid

¹⁵ Rovner, Joshua Randal; *Logic of Military Modernization*, Boston College; 2002
Lebih jauh lihat: http://www.lib.umi.com/dissertations/preview_all/1408901

Tujuan utama modernisasi militer pada dasarnya adalah untuk melindungi negara dari ancaman dari musuh. Namun sesuai tuntutan dunia modern, modernisasi militer tidak terbatas untuk menciptakan *ballace power* dengan rival paling nyata, lebih dari itu untuk menjaga stabilitas regional, serta memperoleh kekuasaan yang lebih luas ditingkat global.

Didalam teori modernisasi militer terdapat 4 macam tipologi modernisasi, yaitu:

Tabel. 2

Tipologi Modernisasi Militer

Relevant Upgrade	Irrelevant Upgrade	Near-Term Upgrade	Long-Term Upgrade
Peningkatan kekuatan yang mempunyai tujuan khusus dalam konteks keamanan regional.	Peningkatan kekuatan yang tidak bertujuan untuk merubah balance of power regional	Peningkatan kekuatan untuk mengatasi ancaman keamanan dalam jangka waktu yang dekat	Peningkatan kekuatan lanjutan yang belum tentu dioperasikan dalam waktu dekat

Sumber: http://www.lib.umi.com/dissertations/preview_all/1408901

Joshua R Rovner menyatakan, dewasa ini terdapat dua jenis model modernisasi militer.

1. Rational Adaptation [RA]

Model pertama ini sangat erat hubungannya dengan paradigma realis.

Realis berasumsi bahwa kondisi dunia yang anarkhi menuntut kemampuan setiap negara dalam menjaga keamanan secara mandiri, karena tiadanya

... dapat menjamin terdapatnya perdamaian serta

tiadanya pelanggaran atau penyerangan terhadap suatu negara oleh pihak agresor.¹⁶ Setiap pemimpin negara harus memastikan bahwa kekuatan yang dimiliki benar-benar mampu menjamin keamanannya. Para pembuat keputusan tersebut, mungkin akan mengumumkan komitmen mereka untuk membangun perdamaian, namun dibalik itu dia akan tetap mempersiapkan teknologi persenjataan yang lebih mutakhir.

Banyak negara menganggap, untuk bisa bertahan ditengah anarkhi dapat dilakukan dengan mengelola *defense* dan *deterrence* dengan baik dalam hubungannya dengan musuh maupun dengan negara lain. Fungsi utama dari pengelolaan *defense* dan *deterrence* tersebut adalah untuk melindungi keamanan nasional dan integritas territorial.¹⁷

Rational Adaptation mengasumsikan bahwa

ketika musuh meningkatkan teknologi perang, suatu negara akan merespon dengan meng-upgrade peralatan yang mereka miliki sehingga kembali dapat tercipta deterence diantara mereka.

Dalam konteks ini, modernisasi militer didefinisikan sebagai proses adaptasi rasional untuk menghadapi perubahan keamanan sekitar wilayah [environment security].

Joseph Grieco menyatakan bahwa negara sangat takut dengan penurunan kemampuan relatif dalam mempertahankan diri ditengah dunia yang anarkhi.¹⁸ Dengan demikian adalah suatu keniscayaan bagi negara-

¹⁶ Waltz, Kenneth, *International Politik*, Adison Wesley;1979

Lebih jauh lihat: http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_all/1408901

¹⁷ Ibid, hal 12

¹⁸ Grieco Joseph M, *Anarchy and the limit of Cooperation*, New York:Columbia University Perss;1993

Lebih jauh lihat : http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_all/1408901

Powel dan DiMaggio mendefinisikan "Isomorphism" sebagai

*proses satu kelompok untuk mengidentikan dirinya dengan kelompok lain ketika dihadapkan pada situasi yang sama.*²⁰

Globalisasi dan kompetisi antar negara adalah alasan utama terjadinya proses homogenitas bentuk institusi, organisasi maupun praktek kebijakan nasional.

Ada 2 tipe isomorphism:

1. Competitive

Mengacu pada sebuah rasionalitas perubahan sistem yang terjadi sebagai akibat dari kompetisi pasar, perubahan selera konsumen, serta ukuran kepantasan.

2. Institusional.

Menurut DiMaggio dan Powel organisasi atau negara dalam dunia modern tidak hanya berkompetisi untuk bahan mentah dan pasar, tetapi juga untuk mendapatkan kekuatan politik, dan legitimasi institusional.

Ada 3 mekanisme yang membuat isomorphism institusional bisa terjadi:

- Coercive isomorphism

Perubahan yang terjadi karena tekanan atau persuasi formal maupun informal terhadap organisasi oleh organisasi lain dimana mereka tergantung pada ekspektasi budaya serta berada pada tempat yang sama.

²⁰ Paul J Megio dan W W Powel, *Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields*; American Sociological Review; 1983

Lebih jauh lihat: http://www.lib.umi.com/dissertations/preview_all/1409001

- Mimetic isomorphism.

Munculnya reaksi organisasi dengan membuat mereka mirip dengan organisasi lain adalah akibat dari kondisi lingkungan yang tidak pasti. Ketidakpastian adalah penyebab utama proses pemiripan. Karakteristik bentuk mungkin tidak disebarkan secara formal, tapi bisa melalui transfer tenaga ahli, atau berkonsultasi. Organisasi yang baru sebagian besar sama dalam hal bentuk dari organisasi pendahulu. Organisasi menyamakan dirinya terhadap organisasi lain dalam kondisi yang sama agar mereka bisa eksis dan mendapat legitimasi.

- Normative Isomorphism.

Menitik beratkan pada profesionalitas. DiMaggio dan Powel mengintegrasikan profesionalitas sebagai usaha bersama untuk menetapkan bagaimana cara mereka bekerja, serta usaha untuk membangun basis kognitif dan legitimasi. Ada dua aspek penting profesionalisasi sebagai sumber penting dalam isomorphism. Satu berhubungan dengan pendidikan formal, serta pengakuan dari institusi terkenal. Sedangkan yang kedua, adalah pertumbuhan jaringan profesional dalam merubah bentuk organisasi.

Dalam hubungannya dengan politik internasional, dan power militer, model isomorphism mengasumsikan negara-negara dihadapkan pada kondisi

negara yang sudah mapan. Begitu halnya dengan organisasi militer, mereka cenderung meniru figur militer ideal ketika dihadapkan pada kondisi anarkhi di dunia yang sama.

Saat ini Amerika Serikat adalah super power dunia, sekaligus merupakan standart ideal militer dunia. Sejak 1991 Amerika Serikat mengembangkan militernya sesuai dengan konsep [*Revolution on Military Affairs*]. Terbukti konsep tersebut mampu menghantarkan dominasi Amerika dalam Perang Modern. Fenomena tersebut menurut model Isomorphism membuat banyak militer dari negara-negara di dunia meniru model ideal militer dunia, dalam hal ini Amerika dengan RMA-nya.

F. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Kebijakan militer RRC dalam menghadapi Krisis Selat Taiwan adalah:

1. Melaksanakan Modernisasi Militer yang disesuaikan dengan kekuatan musuh yang paling nyata yaitu Taiwan. (sesuai dengan model *Rational adaptation*).
2. Program modernisasi militer RRC dilakukan sesuai standart militer dunia (*Revolution on Military Affair*), dengan barometer Amerika Serikat sebagai satu-satunya super power dunia. (sesuai dengan model *isomorphisme*).

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian dibatasi secara ruang waktu, diseputar selat Taiwan pada kurun waktu 2000 – 2005. Alasan peneliti menetapkan waktu penelitian berawal dari tahun 2000 adalah adanya perubahan besar hubungan antar Selat Taiwan menyusul terpilihnya Chen Sui Bian sebagai presiden Taiwan menggantikan Lee Teng Hui. Perkembangan politik terus berlangsung sampai disyahkannya UU anti pemisahan oleh parlemen RRC, pada Maret 2005. UU ini merupakan legitimasi atas penggunaan kekuatan militer RRC dalam penyelesaian Krisis Selat Taiwan.

H. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah *library research* terhadap buku-buku, literatur, makalah ilmiah, kliping koran/majalah, dan journal ilmiah. Selain itu penulis juga melakukan *browsing* melalui internet untuk mencari informasi yang dianggap relevan dengan topik ini. Data dari library research dan browsing informasi berbasis internet tadi, kemudian dianalisa bagaimana hubungan antar variable yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Menggambarkan sejarah awal dan perkembangan krisis selat Taiwan

parlemen RRC. Dalam bab ini juga digambarkan isu-isu sentral seputar selat Taiwan.

Bab III Menggambarkan perimbangan kekuatan di Selat Taiwan dan strategi militer RRC disesuaikan kebutuhan dalam menangkal ancaman yang ditimbulkan Taiwan.

Bab IV Menggambarkan *People Liberation Army* (militer RRC) dan modernisasi yang dilakukan berdasarkan standart RMA.

Bab V Merupakan kesimpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya.